



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 155 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 perlu diubah untuk kedua kalinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 42);
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendidikan Wajib Diniyah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendidikan Wajib Diniyah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 35);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 131);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Ketentuan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 131) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 155

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.  
NIP. 19800715 200501 1 015

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI SUMEDANG**  
**NOMOR 155 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**TAHUN 2019-2023**

**DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023**

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau					
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan
2	Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Dinas Pendidikan
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Dinas Pendidikan
3	Terwujudnya Penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	$\% \text{ penduduk miskin} = \frac{(\text{Jumlah Penduduk Miskin})}{(\text{Total Jumlah penduduk})} \times 100$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pembangunan Gender	Poin	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan					
4	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	hasil survei terhadap variabel persepsi, sikap dan kerjasama umat beragama	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal					
5	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	$Pertumbuhan\ Ekonomi/PDRB = (PDRB\ (t+1)-PDRB\ (t))/(PDRB\ (t))$	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	$(Panjang\ jalan\ Kabupaten\ dalam\ kondisi\ baik)/(Panjang\ seluruh\ jalan\ Kabupaten) \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio Jaringan Irigasi	Persen	$Rasio\ Jaringan\ Irigasi = (Panjang\ saluran\ irigasi)/(Luas\ lahan\ budidaya\ pertanian)$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	$IKLH = (30\% \times IK\ air) + (30\% \times IK\ udara) + (40\% \times IK\ tutupan\ lahan)$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Indeks Risiko Bencana	Poin	$RB = tingkat\ ancaman \times (tingkat\ kerentanan\ kawasan\ yg\ terancam) / (tingkat\ kapasitas\ kawasan\ yang\ terancam)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat					
8	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	Penjumlahan angka tertimbang dari masing-masing komponen manajemen kinerja	Sekretariat Daerah
		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Penjumlahan angka tertimbang dari masing-masing komponen (komponen pengungkit dan hasil)	Sekretariat Daerah
9	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	$SKM = (total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur) / (total\ unsur\ yang\ terisi) \times nilai\ penimbang$	Sekretariat Daerah
MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang					
10	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per Kapita	Rp (juta)	$(Total\ pengeluaran\ Rumah\ tangga) / (Jumlah\ Rumah\ Tangga)$	Sekretariat Daerah
11	Menciptakan wirausaha dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja $\times$ 100 % Jumlah penduduk angkatan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Wirausaha (UMKM)	UMKM	data jumlah UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019-2023

1. SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	Nilai LPPD Kabupaten	Angka	Hasil Penilaian Propinsi atau pusat terhadap Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019	Sekretariat Daerah
2		Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	Hasil akumulasi presentasi jawaban perkomponen sesuai Peratururan Presiden Nomor 29 Tahun 2014	Sekretariat Daerah dan Inspektorat
3		Indeks RB	Point	Hasil Akumulasi presentasi jawaban per komponen sesuai permenpan 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Sekretariat Daerah dan Inspektorat
4		Persentase Perangkat Daerah yang capaian target Tahunannya berkategori baik	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang capaian target Tahunannya berkategori baik}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Sekretariat daerah

2. Sekretariat Dewan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya fasilitasi dan dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Dukungan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi dukungan kegiatan tugas dan fungsi DPRD}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Mengukur pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD</p>	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan



### 3. Inspektorat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Optimalnya Fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	$= \frac{\sum OPD \text{ yang sudah menerapkan SPIP}}{\sum \text{seluruh OPD}} \times 100\%$ <p>Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase implementasi SPIP di setiap OPD yang berjumlah 55 OPD, dalam rangka penilaian level maturitas SPIP di setiap OPD tersebut dilihat dari hasil penilaian <i>Self assessment</i> (SA) yang terbagi dalam 5 unsur (1. lingkungan pengendalian, 2. Penilaian resiko, 3. kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan pengendalian intern). Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Indikator Opini BPK</p>	INSPEKTORAT
2		Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik"	Persen	$= \frac{\sum SAKIP \text{ OPD yang bernilai B}}{\sum \text{seluruh SAKIP OPD yang dievaluasi}} \times 100\%$ <p>Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase nilai evaluasi SAKIP pada setiap OPD yang berkategori (B) dengan nilai range &gt;60 – 70, dengan intepretasi Baik, artinya Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Inspektorat yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori “Sangat Baik” dengan cara menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dasar hukum yang digunakan untuk menilai laporan SAKIP adalah Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Data diperoleh dengan membandingkan persentase nilai evaluasi SAKIP OPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori “ Sangat Baik” dengan jumlah OPD yang dievaluasi. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Nilai SAKIP Kabupaten dan Indikator Indek</p>	INSPEKTORAT
3		Tingkat Kapabilitas APIP/ IACM	Kategori	IACM bertujuan untuk memperkuat atau meningkatkan audit internal melalui langkah evolusi kecil yang disusun menjadi lima level kapabilitas progresif, yaitu: Level 1 : Initial, Level 2 : Infrastructure, Level 3 : Integrated, Level 4 : Managed, Level 5 : Optimizing Setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit internal yang bersangkutan. Semakin tinggi level kapabilitas APIP, menunjukkan semakin meningkatnya ukuran, kompleksitas maupun risiko organisasi. Pada masing-masing level kapabilitas tersebut, terdapat enam elemen audit internal, yaitu: Peran dan layanan audit intern; Manajemen SDM; Praktik profesional; Manajemen kinerja dan akuntabilitas; Hubungan dan budaya organisasi; Struktur tata kelola. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.	INSPEKTORAT

4		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Persen	$= \frac{\sum OPD \text{ yang sudah melaksanakan ZI}}{\sum \text{seluruh OPD}} \times 100\%$ <p>Zona integritas merupakan upaya percepatan pelaksanaan Reformasi birokrasi, dengan menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja. Pembangunan zona integritas dimulai dari pencaangan unit kerja percontohan sebagai Zona Integritas, pembangunan zona integritas, evaluasi internal oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah (Inspektorat jenderal/inspektorat kementerian/Lembaga, inspektorat daerah). Tim penilai internal penilaian mandiri (self assessment) lembar Kerja Evaluasi (ZI) menuju WBK/WBBM terhadap OPD yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK, sesuai dengan PermenpanRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Yang mendukung pada IKU RPMD yaitu Indeks Reformasi Birokrasi</p>	INSPEKTORAT
5		Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi	Persen	$= \frac{\sum \text{temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}} \times 100\%$ <p>untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah temuan. Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan persentase temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.</p>	INSPEKTORAT
6		Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD	Persen	$= \frac{\sum \text{temuan penyimpangan terhadap APBD}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}} \times 100\%$ <p>untuk mengukur persentase penurunan temuan dari penyimpangan keuangan APBD yang material hasil pemeriksaan APIP dengan cara membandingkan jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan APIP. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi</p>	INSPEKTORAT

#### 4. Dinas Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Mutu dan aksebilitas pelayanan pendidikan dasar (SD-SMP)	Angka partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Umur 7-12 Th}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
2		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang sekolah di SMP}}{\text{Jumlah Penduduk Umur 13-15 Th}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
3		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Umur 7-12 Th yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Umur 7-12 Th}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
4		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Umur 13-15 Th yang sekolah di SMP}}{\text{Jumlah Penduduk Umur 13-15 Th}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
5		Persentase Guru yang Bersertifikasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Umur 13-15 Th yang sekolah di SMP}}{\text{Jumlah Penduduk Umur 13-15 Th}} \times 100\%$	Permendikbud Nomor 19 tahun 2019
6		Sekolah pendidikan Dasar kondisi bangunan baik	Persen	$\frac{\text{Jumlah Ruang Kelas yang Baik}}{\text{Jumlah Ruang Kelas Keseluruhan}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
7		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SD)		$\frac{\text{Jumlah Guru SD}}{\text{Jumlah Siswa SD}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
8		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SMP)		$\frac{\text{Jumlah Guru SD}}{\text{Jumlah Siswa SD}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
9	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	APK PAUD	Persen	$\frac{\text{Jumlah Guru SD}}{\text{Jumlah Siswa SD}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
10		Persentase PAUD yang terakreditasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah PAUD yang sudah terakreditasi}}{\text{Jumlah PAUD}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2018
11		Angka partisipasi kasar kesetaraan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 7-12 Th, 13-15 Th, 16-18 Th}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2019
12		Persentase siswa Bersertifikat Diniyah	Persen	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 3-6 Th yg mengikuti wajib diniyah}}{\text{Jumlah siswa kelas 3 s.d.jenjang SD}} \times 100\%$	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019

#### 5. Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatkan Akses, Cakupan dan Mutu Layanan Kesehatan	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Laporan seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
2		Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	Jumlah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Laporan seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
3		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Poin	$\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Laporan seksi mutu pelayanan
4		Persentase Balita Stunting	Persen	$\frac{\text{Jumlah Balita Stunting di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Semua Balita di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
5		Prevalensi HIV/AIDS	Persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15-49 th yang positif HIV}}{\text{Penduduk usia 15-49 th}} \times 100\%$	Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

6		Angka Kesakitan Penyakit Menular	Angka	$\frac{\text{Jumlah kasus baru (diwakili Inciden rate DBD,HIV TB)}}{\text{Jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu}} \times 100.000$	Laporan Seksi Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular
7		Universal Healht Coverage	Persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional}}{\text{Jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$	Laporan seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
8		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	$\frac{\text{Jumlah Indikator bernilai 1 (jawaban Y)}}{12 \text{ indikator} - \Sigma N \text{ (jawaban Not applicated)}}$	Laporan seksi Pelayanan Kesehatan Primer

#### 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	$= \frac{\text{Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Jumlah Panjang jalan Kabupaten}} \times 100 \%$	Dinas PUPR, RPJMD KAB. SUMEDANG TAHUN 2018-2023
2	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi	Rasio jaringan irigasi	Persen	$= \frac{\text{Luas Daerah Irigasi yang terairi}}{\text{Luas Lahan Budidaya Pertanian}} \times 100 \%$	Dinas PUPR, RPJMD KAB. SUMEDANG TAHUN 2018-2023
3	Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah	Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang	Persen	$= \frac{\text{Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Tata Ruang}}{\text{RTRW dan RDTR}} \times 100$	Dinas PUPR, RPJMD KAB. SUMEDANG TAHUN 2018-2023
4	Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Usaha Jasa Konstruksi yang terstandarisasi	Persen	$= \frac{\text{Jumlah target prosentase dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah target prosentase dalam akhir Periode}} \times 100 + \text{Jumlah target tahun sebelumnya}$	Dinas PUPR, RPJMD KAB. SUMEDANG TAHUN 2018-2023

#### 7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Mewujudkan Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	Jumlah Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Seluruh Rumah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2		Persentase lingkungan Pemukiman kumuh	Persen	Jumlah Luas Permukiman Kumuh terhadap Jumlah Luas Permukiman dan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3		Persentase Rumah Tangga berakses air minum	Persen	Jumlah Rumah Tangga yang Berakses terhadap Jumlah Seluruh Rumah Tangga	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	Jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi terhadap Jumlah Seluruh Rumah Tangga	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5		Persentase Bangunan Pemerintahan yang tertata	Persen	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang Tertata terhadap Jumlah Bangunan dan Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi	Persen	Jumlah Kasus Sengketa terhadap Jumlah KK yang Tertangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7		Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	Persen	Jumlah Bidang Tanah yang di Bebasan terhadap Jumlah Rencana Luas Tanah yang akan Dibebaskan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

**8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial dibagi jumlah penduduk dikali 100%	DINSOS-P3A
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	Jumlah Perempuan dan Anak yang mendapatkan layanan P2TP2A dibagi Jumlah Pengaduan dikali 100%	DINSOS-P3A
3		Kabupaten Layak Anak	Skor	Skor Yang Diperoleh	DINSOS-P3A
4		Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi keluarganya	Persen	Jumlah Pekka yang sudah mandiri dibagi Jumlah Pekka dikali 100%	DINSOS-P3A

**9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$\frac{JUMLAH\ PENGANGGUR}{ANGKATAN\ KERJA} \times 100$	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis Dinamis dan Berkeadilan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	$\frac{KASUS\ YANG\ DISELESAIKAN}{KASUS\ YANG\ TERDAFTAR\ KEDISNAKER} \times 100$	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
3	Meningkatnya Penempatan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KK	Jumlah Kuota Transmigran yang di tempatkan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Optimalnya Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Persentase penanganan sampah	persen	$\frac{Jumlah\ Sampah\ yang\ ditangani\ (ton/Tahun)}{Jumlah\ Timbulan\ Sampah\ (Ton/Tahun)} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Bidang Persampahan dan Pertamanan
2		Persentase pengurangan sampah	persen	$\frac{Jumlah\ Sampah\ yang\ berkurang\ disumber\ sampah\ (ton/tahun)}{Jumlah\ timbulan\ sampah\ (ton/tahun)} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Bidang Persampahan dan Pertamanan
3		Persentase RTH Terkelola	Persen	$\frac{Luas\ RTH\ Publik\ yang\ dikelola\ (Ha)}{Luas\ RTH\ Publik\ (Ha)} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Bidang Persampahan dan Pertamanan
4	Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	$IKA = 100 - \left( \frac{\sum Sample\ IPA > 1}{\sum Sampel} \times 100 \right)$ Merupakan Status mutu air yaitu tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan	Laporan Pengendalian dan Pengujian Kualitas Air Sungai Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Bidang Penataan dan Pnaatan Hukum Lingkungan
5		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)$ Merupakan indek mutu udara ambien yaitu keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.	Laporan Pengendalian dan Pengujian Kualitas Udara Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

6		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	$ITV = 100 - \left[ \{84,3 - (TV \times 100)\} \times \frac{50}{54,3} \right]$ LUAS TUTUPAN VEGETASI (LTV) = data kawasan hutan + data luasan hutan hak + data luasan VEGETASI hasil perhitungan/interpretasi (RTH,dll)	Laporan Aktivitas Peningkatan Tutupan Lahan Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Bidang Kehutanan
---	--	--------------------------------------	------	---	---

#### 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Percepatan Penertiban Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Poin	$\frac{\text{Total nilai per Unsur}}{\text{Total nilai yang Terisi}} \times 100\%$	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
2		Persentase Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Wajib KTP	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 atau Telah Menikah}}$	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
3		Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran	Persen	$\frac{\text{Jumlah Bayi ber Akte Kelahiran}}{\text{Jumlah Bayi Lahir}}$	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
4		Persentase Data Ganda dan Anomali	Persen	$\frac{\text{Jumlah Data ganda dan Anomali}}{\text{Jumlah Data Penduduk}}$	Data Kependudukan Bersih (DKB) Dirjen Dukcapil Kemendagri

#### 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Desa	Persentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang	Persen	$\frac{\text{Jumlah Desa Berkembang dan Cepat Berkembang}}{\text{Jumlah Desa Yang Ada}} \times 100\%$	DPMD Bidang Pemerintahan Desa
2	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa	Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang	Persen	$\frac{\text{Jumlah BUMDes Maju dan Berkembang}}{\text{Jumlah BUMDes Yang Aktif}} \times 100\%$	DPMD Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Siskudes	Persentase Penerapan Siskudes Kategori Optimal	Persen	$\frac{\text{Penerapan Siskudes}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	DPMD Bidang Keuangan dan Aset Desa

#### 13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Optimalisasi Pengendalian Penduduk Melalui KB	Total Fertility rate (TFR)	Angka	$\frac{5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i}{ASFR_i}$	DPPKB
2	Meningkatkan Kemandirian Keluarga Peserta KB	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Pra Sejahtera}}{\text{Jumlah Total Keluarga}} \times 100\%$	DPPKB
3		Persentase Keluarga Sejahtera 1	Persen	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Sejahtera 1}}{\text{Jumlah Total Keluarga}} \times 100\%$	DPPKB

**14. Dinas Perhubungan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	Jumlah dokumen, Jumlah ketersediaan rambu-rambu lalu lintas, jumlah ketersediaan PJU, Jumlah terminal; /dermaga	Dinas Perhubungan
2	Meningkatnya Sistem Transportasi yang dapat mendukung Mobilitas masyarakat	Cakupan Trayek Angkutan Umum	Persen	$\frac{\text{Jumlah trayek yang registrasi pada tahun } n}{\text{Jumlah Ijin trayek yang ada}} \times 100$	Dinas Perhubungan
3		Rata - rata Peningkatan Penumpang Angkutan Umum	orang/hari	$\frac{\text{Jumlah penumpang per hari}}{\text{Kapasitas angkutan umum penumpang (Alokasi Angkot/Angdes)}} \times 100$	Dinas Perhubungan
4		Persentase Kendaraan Laik Jalan	Persen	Jumlah Kir Per tahun	Dinas Perhubungan
5	Terciptanya Keamanan Kenyamanan dan Ketertiban Lalu Lintas bagi para pengguna jalan	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Per tahun	Dinas Perhubungan
6		Cakupan Satuan Ruas Parkir (SRP)	Persen	Jumlah Satuan Ruas Parkir (SRP)	Dinas Perhubungan

**15. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah Kecamatan yang ada dalam Kab/Kota}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	Poin	Penjumlahan dari Setiap Nilai Indikator yang dihitung X nilai tingkat kematangan dan bobot indikator	Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data yang Akurat dan Berkualitas	Persen	$\frac{\text{Jumlah Data Yang Akurat}}{\text{Jumlah Data Yang Harus Ada}} \times 100\%$	Hasil Rumusan Bersama Antara Dinas dengan Bappppeda
4		Cakupan Pengamanan Informasi Daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memiliki sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah keseluruhan OPD}} \times 100\%$	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah

**16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	persen	Jumlah subsektor perdagangan besar dan eceran (n) : Jumlah PDRB Tahun n)	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sumedang dan BPS Kab. Sumedang
2		Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	persen	Jumlah subsektor industri pengolahan (n) : Jumlah PDRB Tahun n)	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sumedang dan BPS Kab. Sumedang

3	Mengoptimalkan Peran Koperasi	Cakupan Koperasi Aktif	persen	Jumlah Koperasi Aktif (n) : Jumlah Seluruh Koperasi Tahun (n)	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sumedang
4	Meningkatkan Kualitas Wirausahawan	Jumlah UMKM	UMKM	Jumlah UMKM Tahun (n)	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sumedang

#### 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	(Rp)	Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang	LKPM
2		Indeks Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan	Poin	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	DPMPPTSP

#### 18. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif}}{\text{Jumlah Organisasi Kepemudaan yang ada di Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$	Bidang Pemuda dan Olahraga
2	Meningkatnya Capaian Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet yang berprestasi tingkat Nasional	Orang	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional	Bidang Pemuda dan Olahraga
3	Meningkatnya Ketahanan Budaya Daerah	Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Jumlah Budaya Daerah yang Dilindungi, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dibina}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada}} \times 100\%$	Bidang Kebudayaan
4	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Sumedang	Bidang Pariwisata
5	Mengembangkan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai skala nasional	Persen	$\frac{\text{Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan}}{\text{Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang ada di Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$	Bidang Ekonomi Kreatif

#### 19. Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Peningkatan Pemahaman atas pentingnya arsip dalam pelaksanaan pemerintahan daerah	Peningkatan Jumlah Pengunjung perpustakaan	Orang	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan yang ada di Kabupaten Sumedang. Mengukur Jumlah Kunjungan ke perpustakaan yang ada di Kabupaten Sumedang	Kegiatan Layanan Perpustakaan
2	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan	Cakupan Lokasi yang terlayani melalui pusling	Persen	$\frac{\text{Jumlah Lokasi yang terlayani melalui pusling}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$ Mengukur Jumlah Lokasi yang terlayani melalui pusling dengan jumlah desa di kabupaten sumedang	Kegiatan Layanan Perpustakaan



3	Peningkatan Jumlah Koleksi Pustaka sesuai dengan minat masyarakat	Tingkat kepuasan pengunjung	Persen	Jumlah Kepuasan pengunjung Mengukur Jumlah kepuasan pengunjung melalui Standar Kepuasan Masyarakat (SKM)	SKM ( standar Kepuasan Masyarakat)
4	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standar	Persen	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang arsipnya sesuai standar}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$ Mengukur Jumlah Perangkat Daerah yang berstandar arsipnya	Kegiatan Pembinaan Kearsipan

#### 20. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor :			
		a. Tanaman Pangan	Persen	$Gt = \frac{PDRBt - PDRBt - 1}{PDRBt - 1} \times 100\%$ Gt = Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan PDRBt = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman pangan pada suatu tahun PDRB = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman pangan pada tahun sebelumnya	Badan Pusat Statistik Kab. Sumedang
		B. Tanaman Hortikultura	Persen	$Gt = \frac{PDRBt - PDRBt - 1}{PDRBt - 1} \times 100\%$ Gt = Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman hortikultura PDRBt = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman hortikultura pada suatu tahun PDRB = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman hortikultura pada tahun sebelumnya	Badan Pusat Statistik
	c. Tanaman Perkebunan	Persen	$Gt = \frac{PDRBt - PDRBt - 1}{PDRBt - 1} \times 100\%$ Gt = Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman perkebunan PDRBt = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman perkebunan pada suatu tahun PDRB = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman perkebunan pada tahun sebelumnya	Badan Pusat Statistik	
2	Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Sektor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	$PPH = \% \text{ Angka Kecukupan Gizi (AKG)} \times \text{ bobot masing - masing kelompok pangan}$ Pola Pangan Harapan adalah susunan panga yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dicerminkan dari besaran skor pola pangan harapan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi Skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.	Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik

**21. Dinas Perikanan dan Peternakan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Produktivitas Hasil Perikanan dan Peternakan	Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan	Persen	$\frac{((PDRB\ ADHK\ perikanan\ tahun\ n - PDRB\ ADHK\ perikanan\ (n-1) / PDRB\ ADHK\ perikanan\ tahun\ (n-1)) \times 100\%}{1}$	BPS Kab. Sumedang
2		Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan	persen	$\frac{((PDRB\ ADHK\ peternakan\ tahun\ n - PDRB\ ADHK\ perikanan\ (n-1) / PDRB\ ADHK\ peternakan\ tahun\ (n-1)) \times 100\%}{1}$	BPS Kab. Sumedang

**22. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD	Persen	$\frac{Jumlah\ Sasaran\ Renstra\ Tahun\ Berkenaan}{Jumlah\ Sasaran\ RPJMD\ yang\ harus\ Dilaksanakan\ Tahun\ Berkenaan} \times 100\%$	RPJMD dan RENSTRA
2		Tingkat Kesesuaian RKPd terhadap RPJMD	Persen	$\frac{Jumlah\ Sasaran\ RKPd\ Tahun\ Berkenaan}{Jumlah\ Sasaran\ RPJMD\ yang\ harus\ Dilaksanakan\ Tahun\ Berkenaan} \times 100\%$	RPJMD dan RKPd
3		Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPd	Persen	$\frac{Jumlah\ Sasaran\ Renja\ Tahun\ Berkenaan}{Jumlah\ Sasaran\ RKPd\ yang\ harus\ Dilaksanakan\ Tahun\ Berkenaan} \times 100\%$	RKPd dan RENSTRA
4		Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik"	Persen	melihat fakta hasil pembangunan yg dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian	RPJMD
5	Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	Persen	$\frac{Jumlah\ Penelitian\ dan\ Pengembangan\ yang\ diimplementasikan\ (n)}{Jumlah\ Penelitian\ dan\ Pengembangan\ yang\ dilaksanakan\ (n-1)} \times 100\%$	DOKUMEN PENELITIAN dan DPA

**23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, Disiplin ASN dan Pelayanan Kepegawaian yang Bersih dan Melayani	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	Hasil dari aplikasi (situs) DJSAN yang diinput oleh BKPSDM	BKN
2		Indeks Sistem Merit ASN	Poin	Hasil dari Aplikasi (situs) SIPINTER yang diinput oleh BKPSDM	KASN

**24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Opini	Penjelasan : Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Formulasi : Opini yang didapat dari Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD
2		APBD Tepat Waktu	Status	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	BPKAD

**25. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	Penjelasan : Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dengan Realisasi Pendapatan dengan Target 17.03 %	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Formulasi : $\frac{\text{Realisasi Asli Pendapatan Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$					
2		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	Poin	Penjelasan : Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat IKM 85 Poin Formulasi : Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

**26. Satuan Polisi Pamong Praja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Efektivitas Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Tibumtranmas	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT)	Persen	$\frac{\sum \text{satuan Linmas}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Terciptanya Kondisi Wilayah yang Aman, Nyaman, Tertib, Teratur dan Tentram	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	$\frac{\text{Pelanggaran K-3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K-3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mematuhi Peraturan Perundang - Undangan Daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani	Persen	$\frac{\text{Penyelesaian Pelanggaran Penegakan PERDA}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	$\frac{\sum \text{Luas WMK (Luas Lingkaran)}}{\sum \text{luas potensi kebakaran}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja
5		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	$\frac{\sum \text{kasus kebakaran di WMK yg tertangani dlm waktu tanggap}}{\sum \text{kasus kebakaran dlm jangkauan WMK}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja

**27. Rumah Sakit Umum Daerah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai kewenangan Kelas B	Persen	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien yang dirujuk}}{\text{Total Kunjungan Pasien}} \times 100\%$	RSUD Kabupaten Sumedang
2		IKM Rumah Sakit	poin	Nilai Indeks X Nilai Dasar	RSUD Kabupaten Sumedang
3		Persentase Pencapaian Indikator Mutu Pelayanan di Rumah Sakit	Persen	$\frac{\text{Numerator}}{\text{Denominator}} \times 100\%$	RSUD Kabupaten Sumedang

**28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Pengurangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sumedang	Indeks Resiko Bencana	Poin	Penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana	BPBD
Formulasi : Risiko (R) = Bahaya (H) x $\frac{\text{Kerentanan (V)}}{\text{Kapasitas (C)}}$					

**29. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Negara Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Indeks kerukunan umat beragama	Persen	SURVEI Index Kerukunan Umat Beragama	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2		Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Persen	$100 / 100 + (\text{jumlah konflik}) \times 100\%$	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Tingkat Partisipasi dalam Mendukung Proses Demokrasi	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	$(\text{Jumlah suara sah} + \text{Suara Tidak sah}) \times 100\%$	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4		Persentase Ormas yang dibina kategori Aktif	Persen	$\text{jumlah ormas} / \text{jumlah ormas aktif} \times 100\%$	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

**30. Kecamatan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang Terisi dikali Nilai Penimbang (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017)	Kecamatan
2		Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	KK	Jumlah Rumah Tangga Miskin Desil 1 dan 2 yang keluar dari data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Kecamatan
3		Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	Persen	Jumlah Desa yang menggunakan 4 Menu Siskeudes (Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan) dibagi Jumlah Desa dikali 100 Persen	Kecamatan
4		Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	Jumlah Kejadian Bencana yang ditangani dibagi Jumlah Bencana dikali 100 Persen	Kecamatan
5		Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	Jumlah SPPT PBB yang dibayar dibagi jumlah SPPT PBB dikali 100 Persen	Kecamatan

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR